GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**:SUARA PEMBARUAN**	**Tanggal**	**: 6 MEI 2006**
Subyek	**:KEBAKARAN HUTAN**	**Hari**	**: SABTU**
		Halaman	**: 6**

Kebakaran Hutan Mengancam
Pemerintah Janji Tak Ekspor Asap

[JAKARTA] Pemerintah menargetkan tidak akan mengekspor asap ke negara tetangga pada musim kemarau tahun ini. Tetapi pemerintah juga tidak menjamin tidak adanya peristiwa kebakaran hutan lagi. Untuk meminimalkan jumlah titik api yang mungkin terjadi di lahan gambut, pemerintah akan mengkoordinasikan pengelolaan lahan itu di bawah Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH).

Hal itu disepakati dalam rapat koordinasi antara KLH, Departemen Pertanian, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kehutanan, dan Departemen Dalam Negeri, di Jakarta, Jumat (5/5).

Menteri Negara Lingkungan Hidup menjelaskan, pihaknya menjadi koordinator pengelolaan lahan gambut yang berwawasan lingkungan, terutama dari ancaman bahaya kebakaran hutan. "Sudah delapan tahun lahan gambut ditelantarkan, karena *blunder* kebijakannya, sehingga menghancurkan keanekaragaman hayati. Saat ini kita mencoba menata kembali semua kebijakan yang sudah dimiliki oleh berbagai instansi," ujar Rachmat.

Menurutnya, lahan gambut yang ada di wilayah Sumatera dan Kalimantan rentan terhadap bahaya kebakaran hutan, terutama akibat pembukaan lahan atau keteledoran masyarakat. "Mulai tahun ini, *insya Allah* tidak akan ada asap yang dieskpor, kalau asap yang dibikin itu pasti ada," ujar Rachmat.

Dalam waktu dekat KLH mendata kebijakan-kebijakan pengelolaan lahan gambut yang dimiliki oleh semua instansi. Kebijakan itu akan disatukan untuk dibuat *masterplan* pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Selanjutnya upaya rehabilitasi akan dilakukan mulai tahun ini, terutama di daerah yang sudah kritis, seperti sejumlah lahan di Kalimantan Tengah.

Lahan Gambut

Koordinator Penyusunan Rencana Aksi Nasional untuk Pengelolaan Lahan Gambut yang Berkelanjutan, Masnellyarti Hilman mengatakan pekerjaan perumusan *masterplan* itu dilakukan selama dua bulan ini.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Pemerintah daerah akan mendapat porsi yang besar dalam pengelolaan lahan ini, terutama dalam pelaksanaan rehabilitasi. Dana yang dikeluarkan dalam rehabilitasi lahan gambut ini akan menggunakan dana APBN, serta dana bantuan dari sejumlah lembaga donor.

Kajian *masterplan* ini juga akan menentukan wilayah gambut untuk konservasi dan juga yang boleh dibuka untuk pertanian. "Kita sudah ada kesepakatan, gambut dengan ketebalan di atas empat meter akan dijadikan lahan konservasi," ujar Masnellyarti.

Saat ini, Indonesia memiliki 20 juta hektare lahan gambut, sehingga sering disebut sebagai salah satu negara yang memiliki lahan gambut terluas. Namun, selama bertahun-tahun pengelolaan lahan gambut tidak memperhatikan prinsip-prinsip ekologi, sehingga setiap tahunnya lahan gambut terdegradasi. [K-11]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup